



Bulan:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Tahun:

2	0	2	4
---	---	---	---

tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Subbagian Humas dan TU Kalan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

Media:	Radar Sampit	Halaman:
Kompas Elektronik	Kalteng Pos Palangka Post	Borneo News Tabengan

# Pemkab Katingan Pertanyakan Dividen Bank Kalteng Cabang Kasongan

**KASONGAN-** Tak dibayarkannya deviden dari Bank Kalteng Cabang Kasongan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Katingan mendapatkan sorotan dari pejabat tinggi pemerintahan setempat. Peralpnya, sudah dua tahun penyertaan modal dilakukan Pemkab Katingan.

Ditungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Katingan Pransang, bahwa pihaknya sudah mempertanyakan hal terkait deviden itu ke pihak Bank Kalteng Cabang Kasongan. Dirinya pun memastikan akan menindaklanjuti pertanyaan dari kalangan legislatif ketika penyampaian hasil kerja pada rapat gabungan komisi tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (APBD) Kabupaten Katingan tahun 2023.

"Sampai sekarang deviden dengan nilai miliaran rupiah belum diberikan pihak Bank Pembangunan Daerah tersebut. Bahkan, deviden hasil penyertaan modal yang belum tersebut mencakup dua tahun, yakni deviden tahun 2022 dan 2023, "ujarnya, Jumat (28/7).

Pransang juga menyebutkan, hingga saat ini belum ada hasil realisasinya terkait deviden tersebut, walaupun ada janji akan dibayarkan kemarin. Ia pun menegaskan, Pemkab Katingan akan berjuang dan memastikan mempertanyakan hal tersebut, karena deviden menjadi instrumen penyumbang pendapatan asli

daerah (PAD).

"Cukup besar nilai devidennya hampir puluhan miliar. Sehingga kami berharap ini bisa ditanggapi oleh Bank Kalteng Cabang Kasongan untuk mencermatinya, jangan sampai menjadi temuan pemeriksaan, "tegasnya.

Apalagi tambah Pransang, pihak DPRD Katingan pun sudah membahas kejelasan pemberian deviden atas hasil penyertaan modal itu ke dalam rapat badan musyawarah dan hasil kerja gabungan komisi DPRD Kabupaten Katingan. Sehingga realisasi pertanggungjawaban APBD 2023 menjadi pengingat dalam transparansi anggaran daerah. (sos/gus)